

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

Helmi Fadilah¹, Santi Deswita², Rusyaida³, Indika Juang Putra⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : helmifadilah29@gmail.com¹, santideswita@uinbukittinggi.ac.id²,
rusyaida@iainbukittinggi.ac.id³, indikajputra@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian tentang Penggunaan Akuntansi Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Tidak ada laporan tentang perubahan saldo anggaran lebih atau laporan arus kas karena BPKAD belum menyusun tujuh komponen pelaporan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual, sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, belum berhasil diterapkan oleh sistem informasi keuangan daerah BPKAD dalam penyusunan laporan keuangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana akuntansi berbasis akrual digunakan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Metodologi kualitatif deskriptif penelitian ini mencakup data sekunder dari catatan keuangan yang disediakan oleh BPKAD Provinsi Riau di samping data primer dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual tidak diterapkan seefektif yang seharusnya di BPKAD Provinsi Riau. Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan tujuh bagian laporan keuangan daerah berbasis akrual, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan tujuh komponen laporan keuangan wajib yang dapat disediakan oleh BPKAD Provinsi Riau.

Kata Kunci: Akuntansi Akrual, Laporan Keuangan, BPKAD.

Abstract

Research on the Regional Financial and Asset Management Agency of Riau Province's Use of Accrual Accounting in Financial Report Preparation. There are no reports on changes in excess budget balances or cash flow reports because BPKAD has not compiled the seven components of financial reporting in compliance with Permendagri Number 64 of 2013. This suggests that accrual-based accounting, as required by Permendagri Number 64 of 2013, has not been successfully implemented by the BPKAD regional financial information system in the compilation of its financial reports. This study's goal is to examine how accrual-based accounting is used to prepare financial reports in accordance with Permendagri Number 64 of 2013. This study's descriptive qualitative methodology includes secondary data from financial

records provided by BPKAD of Riau Province in addition to primary data from observations, interviews, and documentation. The study's findings suggest that accrual-based accounting is not being implemented as effectively as it may be in Riau Province's BPKAD. The Budget Realization Report, the Report on Changes in the Surplus Budget Balance, the Operational Report, the Report on Changes in Equity, the Balance Sheet, the Cash Flow Report, and the Notes to the Financial Statements are the seven parts of accrual-based regional financial reports, as per Minister of Home Affairs Regulation Number 64 of 2013. The Budget Realization Report, the Report on Changes in the Surplus Budget Balance, the Operational Report, the Report on Changes in Equity, the Balance Sheet, and the Notes to the Financial Statements are the seven mandatory financial report components that the Riau Province BPKAD is able to provide.

Keywords: *Accrual Accounting, Financial Statements, BPKAD.*

PENDAHULUAN

Perbaikan dalam penyajian laporan keuangan menjadi krusial mengingat peran strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Standar akuntansi yang baik akan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Standar akuntansi merupakan pedoman umum yang dibuat oleh badan pembuat standar untuk membekali penyusun dalam pelaporan keuangan serta membantu pengguna dalam memahami laporan keuangan. yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan sesuai dengan tujuan akhir dari laporan keuangan yang terdapat dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (Nini Sumarni, 2017). Untuk membantu penyusunan laporan keuangan sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013, yang mengatur penerapan

akuntansi berbasis akrual di sektor pemerintah, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) telah menetapkan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual. Kriteria ini memiliki landasan hukum yang kuat, diperkuat oleh Undang-Undang No. 71 Tahun 2010, yang merupakan bagian dari seperangkat aturan tentang pengelolaan keuangan publik untuk mengembangkan. Ini berarti bahwa pemerintah harus segera menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual terbaru untuk pelaporan.

Dengan diperkenalkannya sistem akuntansi berbasis akrual, pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang benar-benar mewakili pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah awal yang penting menuju keterbukaan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pemerintahan, khususnya di antara instansi yang bertugas mengawasi dana dan aset daerah, adalah penerapan akuntansi berbasis akrual.

Alasan utama transformasi ini adalah penerapan peraturan yang mengamanatkan transisi dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah daerah, termasuk Provinsi Riau. Penyesuaian ini dilakukan dengan tujuan menjadikan laporan keuangan pemerintah lebih akurat, relevan, andal, dan mudah dipahami, sehingga meningkatkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan, ekonomi, dan sosial.

Menyajikan data mengenai status keuangan, realisasi anggaran, surplus atau defisit anggaran, arus kas, kinerja operasional, dan perubahan ekuitas merupakan tujuan utama penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Para pemangku kepentingan yang menyusun dan mengevaluasi rencana alokasi sumber daya sekaligus mendorong partisipasi publik akan merasakan manfaat informasi ini.

Pemerintah daerah diwajibkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 untuk menyusun laporan

keuangan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang terbuka dan akuntabel, pemerintah daerah wajib mencantumkan informasi penting lainnya dalam laporan keuangannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan tersebut. Untuk menyajikan gambaran lengkap operasional entitas selama periode tertentu, laporan non-keuangan dan data lainnya wajib disertakan dalam laporan keuangan.

Tidak dapat disangkal, ketidakpuasan klien dengan pelaporan keuangan berbasis kas telah mendorong perbaikan dalam akuntansi pemerintah. Semua orang memahami bahwa akuntansi berbasis kas terutama mencakup informasi tentang pendapatan dan pengeluaran kas; akibatnya, pemerintah mengadopsi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, yang dianggap lebih berhasil dalam melaporkan semua transaksi dan peristiwa yang penting bagi akuntansi.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan merupakan tujuh komponen utama pelaporan keuangan yang membentuk sistem ini. Implementasinya memengaruhi sistem ini, yang merupakan salah satu komponen sistem pelaporan. Namun demikian, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran belum sepenuhnya terintegrasi dalam prosedur pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Dengan judul Skripsi ini, peneliti berharap dapat melakukan studi lebih lanjut mengenai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau: “Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.”.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi ini relevan karena dalam interaksi antara pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan pegawai sebagai pihak yang diwakilkan, ada kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. Diharapkan bahwa akuntansi yang berlandaskan akrual dapat meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab, sehingga bisa mengurangi konflik kepentingan tersebut. Teori agensi menekankan fokusnya pada interaksi antara

pemangku kepentingan dan pihak yang diwakilkan, memberikan panduan yang bermanfaat untuk memahami interaksi dalam berbagai konteks, termasuk di institusi pemerintahan. Dengan memahami teori ini, kita bisa menganalisis lebih dalam tentang penerapan akuntansi berbasis akrual.

Akuntansi merupakan keterampilan dalam mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi dengan cara yang sistematis, sedangkan basis akuntansi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk menentukan kapan pendapatan, pengeluaran, perpindahan, dan kejadian lainnya diakui dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, basis akuntansi berkaitan dengan waktu penerimaan atau pencairan dana, atau saat hak dan kewajiban ditetapkan. Dengan mendokumentasikan semua masukan dan pengeluaran sumber daya, teknik akuntansi berbasis akrual memberikan informasi yang lengkap. Transaksi didokumentasikan saat terjadi, terlepas dari kapan uang diterima atau dibayarkan. Meskipun keduanya dapat diubah dan digabungkan untuk membentuk akun keuangan, umumnya terdapat dua jenis basis akuntansi: akrual dan kas.

Laporan keuangan pemerintah yang menggunakan pendekatan akrual memuat

data tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pemerintah, di samping data penerimaan dan pengeluaran kas. Informasi ini sangat penting dalam menganalisis stabilitas fiskal serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan tujuan akuntansi berbasis akrual. Metode ini membuat informasi keuangan lebih lengkap dan relevan karena mencerminkan hak dan kewajiban pemerintah secara keseluruhan, bukan hanya transaksi kas. Pengakuan yang lebih menyeluruh tentang pendapatan, belanja, aset, dan liabilitas memungkinkan laporan keuangan menjadi alat yang dapat diandalkan untuk menunjukkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Selain itu, hal ini meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 menyatakan bahwa untuk menjamin kualitas dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan daerah harus mencakup tujuh komponen utama yang disusun secara akrual. Komponen-komponen tersebut terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas,

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kondisi keuangan suatu organisasi selama periode waktu tertentu didokumentasikan secara sistematis dalam laporan keuangan. Hanafi menegaskan bahwa laporan keuangan membantu investor, manajemen, dan calon investor dalam pengambilan keputusan. Ekspektasi pemangku kepentingan seringkali dipengaruhi oleh informasi dalam laporan keuangan mengenai arus kas, risiko, dan tingkat profitabilitas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, akuntansi berbasis akrual akan diterapkan., pemerintah daerah diharuskan untuk menyusun secara menyeluruh dan akurat laporan yang terdiri dari ketujuh komponen berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
3. Laporan Operasional,
4. Laporan Perubahan Ekuitas,
5. Neraca,
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah dan aturan akuntansi berbasis akrual bagi

pemerintah daerah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Istilah lain untuk sistem ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem ini terdiri dari serangkaian prosedur, aktivitas, instrumen, dan unsur lain yang digunakan untuk menjalankan fungsi akuntansi bagi pemerintah daerah, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan.

Seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan, diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berperan sebagai sumber informasi utama.

Tujuan utama SAP adalah meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di sektor publik dengan menghasilkan laporan keuangan yang berfungsi sebagai pemeriksa pelaksanaan APBN dan APBD. Laporan keuangan ini membantu menilai kinerja dan efektivitas entitas pelaporan,

posisi keuangan, nilai sumber daya ekonomi yang digunakan, dan tingkat kesesuaian pengelolaan keuangan dengan peraturan yang berlaku. Untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang jelas dan efektif, setiap entitas pelaporan wajib secara teratur memberikan informasi tentang tindakan yang telah diambil dan hasil yang dicapai selama periode pelaporan.

Selain itu, akuntansi berbasis akrual memberikan pengukuran kinerja yang lebih akurat, pengakuan liabilitas secara tepat waktu, dan pengungkapan yang lebih menyeluruh tentang kewajiban masa depan. Hal ini penting untuk menilai bagaimana organisasi pemerintah menggunakan sumber daya ekonomi dan membantu membangun tata kelola keuangan publik yang lebih baik..

Dengan menerapkan sistem akrual, laporan keuangan pemerintah tidak hanya menampilkan penerimaan dan pengeluaran kas yang telah terjadi, tetapi juga menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Hal ini sangat krusial untuk mengevaluasi seberapa efisien dan efektif penggunaan sumber daya, serta mengukur keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang

METODE PENELITIAN

Teknik kualitatif deskriptif, yang merupakan strategi yang digunakan dalam penelitian ini, menggambarkan suatu fenomena menggunakan bahasa dan frasa yang mengikuti kaidah ilmiah. Hal ini dicapai dengan mengkaji gagasan-gagasan yang relevan dan memberikan gambaran umum atas data yang tersedia saat ini melalui analisis laporan keuangan.

Wawancara langsung dengan operator SIPD dan Direktur Divisi Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan sumber data utama penelitian ini. Data sekunder mengenai akuntansi berbasis akrual diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menjadi lokasi kedua wawancara tersebut. Salah satu langkah metodologis dalam proses analisis data adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data dari lapangan, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait penyusunan

laporan keuangan, penelitian yang dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menunjukkan banyak temuan yang menjadi dasar identifikasi permasalahan, khususnya terkait penggunaan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dirancang untuk menyediakan layanan informasi elektronik yang terintegrasi dan terkoneksi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang efisien. SIPD mengelola informasi seperti data keuangan dan pemerintahan lainnya, termasuk pembangunan daerah. Dengan kata lain, SIPD membangun jaringan Operator Perangkat Daerah yang saling terhubung, dan semua data dari setiap daerah dikumpulkan menjadi satu sistem. Setiap instansi pemerintah menerapkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan tujuan untuk menstandarisasi penggunaan sistem, yang akan memudahkan penyampaian rencana dan anggaran oleh setiap instansi dan mendorong tata kelola yang lebih inventif dan kreatif.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SIPKD hanya dapat diakses oleh unit organisasi pemerintah daerah tertentu,

SIPD terhubung dengan seluruh instansi di Indonesia. Akuntansi berbasis akrual belum sepenuhnya diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 belum sepenuhnya diimplementasikan. BPKAD Provinsi Riau telah menyusun dan menerbitkan sejumlah laporan keuangan, seperti Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Namun, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) merupakan dua laporan yang belum disusun.

Karena kekurangan sumber daya manusia, keterlambatan dan keterlambatan dalam penyusunan kedua laporan tersebut menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual tidak sepenuhnya diterapkan. Hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait di BPKAD Provinsi Riau menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan teknis untuk membuat laporan keuangan berbasis akrual, terutama dalam menyusun Laporan Arus Kas dan

Laporan Perubahan Saldo Anggaran dengan lebih tepat waktu dan sesuai.

Banyak petugas keuangan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dan cara membuat laporan keuangan berbasis akrual, terutama laporan yang membutuhkan pengolahan data anggaran dan pembagian transaksi kas sesuai dengan operasi mereka. Sebagai bagian dari kontribusi penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan bantuan dalam pembuatan laporan yang belum ada. Berdasarkan data keuangan yang dikumpulkan dan setelah menganalisis transaksi anggaran serta saldo awal dan akhir dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), peneliti berhasil menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagai tambahan untuk laporan keuangan yang belum tersedia. Penyusunan laporan ini dilakukan dengan mengikuti pendekatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual dan mengacu pada struktur yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan demikian, meskipun laporan ini awalnya tidak ada, LPSAL akhirnya dapat disusun sebagai bagian dari hasil penelitian ini.

Namun, situasinya berbeda ketika berbicara tentang penyusunan Laporan Arus Kas (LAK). Karena sejumlah

tantangan yang rumit, termasuk ketersediaan data transaksi kas yang komprehensif dan tidak adanya sistem informasi akuntansi yang dapat mengklasifikasikan aktivitas kas ke dalam kategori operasi, investasi, dan pendanaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, peneliti tidak dapat menghasilkan Laporan Keuangan (LAK). Selain itu, penyusunan LAK tidak layak dalam konteks penelitian ini karena pemahaman tim Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKP) Provinsi Riau masih sangat terbatas tentang proses penyusunan laporan, serta tidak adanya bimbingan teknis atau dukungan aplikasi yang memadai. Menurut hasil ini, konsep akrual telah digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penyusunan laporan keuangan, namun aplikasi ini belum ideal.

Ada kekhawatiran serius bahwa kelengkapan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 karena tidak adanya dua laporan penting: Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Akibatnya, mungkin timbul kekhawatiran mengenai akuntabilitas dan transparansi

keuangan daerah, terutama terkait pelaporan arus kas dan status keuangan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masih mengalami kesulitan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan yang menyeluruh dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Untuk menjamin penyajian seluruh komponen laporan keuangan secara menyeluruh dan konsisten di masa mendatang, upaya peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi akuntansi yang mendukung pelaporan akrual yang komprehensif, dan penyediaan bantuan teknis yang berkelanjutan perlu dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Dua komponen laporan keuangan yang wajib disusun dalam sistem akuntansi berbasis akrual, yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

dan Laporan Arus Kas (LAK), masih belum tersaji secara lengkap.

Penyusunan kedua studi ini sebagian besar terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia. Komponen teknis akuntansi berbasis akrual masih sulit dipahami oleh banyak penyusun laporan keuangan, terutama dalam penyusunan LPSAL (Pelaporan dan Akuntansi) dan LAK (Laporan Keuangan dan Akuntansi). Selain itu, prosedur pelaporan yang otomatis dan akurat belum sepenuhnya didukung oleh teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Riau belum optimal. Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, pemutakhiran sistem informasi akuntansi, dan pendampingan teknis dari instansi terkait sangat diperlukan untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan upaya-upaya tersebut, seluruh komponen laporan keuangan akan tersusun secara lengkap, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasya A, Lasabuda, jenny morasa,

Victorina Z, Tiroyah, ‘Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara’, *Riset Akuntansi*, 2020, pp. 167–74

Ahmad, Amelia, and Sulaiman, ‘Analisis Penerapan Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende’, *Jurnal Akuntansi (JA)*, 10.1 (2023), pp. 68–85

Effendi, Syahril, Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Cv Batam Publisher, 2021)

Fernisia, Mike, Sony Fransisco Siboro, Paulina Putri Ningrum, and Salsabilla Dwiyantri, ‘Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Pelaporan Keuangan Sektor Publik (Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih 2022)’, *Trilogi Accounting and Business Research*, 5.1 (2024), pp. 5–6

Fitriana, Aning, *BUKU AJAR ANALISIS LAPORAN KEUANGAN*, ed. by Reza

- Rahmadi Hasibuan (CV. MALIK RIZKI AMANAH, 2024)
- Mumu, Praisya, Lintje Kalangi, Peter M Kapojos, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, and others, 'Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaL Pada Laporan Keuangan Daerah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Analysis of the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards (SAP) in the Financial Sta', 7.3 (2023), pp. 105–14
- Nini Sumarni, "Pengaruh pengungkapan outhere comprehensive income terhadap asimetri informasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 2017
- Permadi, Hendra Hafid, 'Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Desa Sukoharjo , Kecamatan Sekampung , Lampung Timur)', 1.3 (2024)
- Rosana, Lina, and Risma Wira Bharata, 'Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan', *Jurnalku*, 3.1 (2023), pp. 23–34
- Sinurat, Marja, Rizqi Sukma Sari Putri, Womsiter Sinaga, and Ayu Widowati Johannes, 'Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara', *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10.1 (2023), pp. 89–105
- Sitoyo, Sandu, and Ali Sodik, 'DASAR METODOLOGI PENELITIAN', *Literasi Media Publishing*, 2020, p. 83
- Sudaryati, Erina, and Toto Da'i Permana, 'Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur', *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5.1 (2020), p.